KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP : W.32.OT.02.02-70** **TGL PEMBUATAN : 03 Februari 2025** **TANGGAL REVISI : 03 Februari 2025** **TANGGAL EFEKTIF : 03 Februari 2025** **DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Wilayah,** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002** **NAMA SOP : REKONSILIASI LK KANWIL HUKUM KEPULAUAN RIAU**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 Tentang Standar Struktur Biaya; 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi SAKTI dan MONSAKTI; 3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 4. Memahami sistem akuntansi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengajuan permintaan pembayaran melalui surat perintah membayar ganti uang persediaan (GUP); 2. SOP Pengajuaan Permintaan Pembayaran melalui surat perintah membayar langsung (LS) ke rekening pihak ke 3/rekanan; 3. SOP Pengajuan Permintaan pembayaran melalui surat perintah membayar langsung LS ke rekening bendahara pengeluaran	1. Komputer dan printer; 2. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka pelaporan keuangan tidak tepat waktu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DENGAN KPPN

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KEPALA BAGIAN TU DAN UMUM	OPERATOR GLP	OPERATOR ASET	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	OUTPUT	
1	Kepala Bagian TU dan umum memerintahkan untuk melakukan kegiatan rekonsiliasi LK Kanwil Kemenkum dengan KPPN	Mulai				Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Operator GLP dan Operator Aset melakukan Rekonsiliasi Internal					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Operator GLP Menyusun Memo Penyesuaian (apabila ada)					Excel Memo Penyesuaian	30 Menit	Memo Penyesuaian	
4	Operator GLP Melakukan Monitoring pada Aplikasi Monsakti					Monasakti	1 hari	SHR	
5	Operator GLP dan Operator Aset melakukan tutup periode bulan berkenaan					Sakti	5 Menit	SHR	
6	KPPN Menerbitkan SHR				Selesai	Monasakti	1 hari	SHR	

